

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NO 5 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA JASA WARUNG INTERNET

Oleh :

Ikhsan Rahmat H

Email : ikhsanrachmat@gmail.com

Pembimbing : Dr. Fberi Yuliani, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Tanah Datar is one area that is located in Indonesia, specifically in the province of West Sumatra, in the Tanah Datar stood internet cafes, internet cafes in Tanah Datar set in the Regional Regulation, which in regional regulation governs all concerned denganwarung internet, both owners of internet cafes, as well as users of internet cafes, but it is unfortunate, internet cafes located in Tanah Datar many will not fit with prescribed rules, many stalls internet-breaking rules such as internet cafes do not have a business license, warunja internet which is open late at night, wear bulkhead exceed 40 cm, and let the children play school internet cafe wearing a school uniform. This study aims to determine how the implementation of Tanah Datar District Regulation No. 5 2015 On Public Internet service permit and the factors that affect the implementation of Tanah Datar District Regulation No. 5 2015 On Public Internet service permit.

The theory used is the theory of Van meter and Horn in Sujianto that there are six variables determine the successful implementation of policies, among others, Standards and Objectives, Resources policies, Activity Observation and Communication interorganizational, Character Executive, Economic Conditions Social and Political Disposition or attitude Executor, Licensing Services Office of Tanah Datar, and who serves as key informant was the head of the field of Communications and Information Technology, Section Head of Investigation , and the head of Licensing. Data collection techniques such as interviews, observation and documentation. And data analysis using triangulation techniques.

From the results of this research note that the implementation of Tanah Datar l, from the Department of spaciousness Perhub.kominfo less oversight, and lack of regulation of Internet cafés to socialize either directly or indirectly, from municipal police are still limitations Employees and Human Resources Shortage of qualified, and from the Office of Integrated Services Licensing is still at least owners of internet cafes that make business license because the number of internet cafés's Terms to create a business license internet cafes. Factors affecting the implementation of the Regional Regulation Tanah Datar, lack of communication carried out by implementing policies to the public, and lack of public awareness and the owner whitewater internet and many owners of internet cafes that do not approve of Tanah Datar District Regulation No. 5 of 2015 On Public Internet service permit

Keywords: *Licensing, Implementation, inhibiting factor*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa kini teknologi telah banyak berkembang di masyarakat. Penggunaan teknologi oleh manusia sendiri diawali dengan alat-alat sederhana yang dibuat oleh manusia pada jaman dahulu. Contohnya saja pada teknologi otomotif, mungkin roda saat ini dianggap oleh manusia hanya biasa saja.

Internet adalah salah satu bagian dari perkembangan teknologi, yang mana internet merupakan singkatan dari interconnection networking yang artinya jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan jutaan bahkan milyaran jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis. Internet mempunyai dua peranan penting yaitu Sejarah internet masuk ke-Indonesia bermula pada awal tahun 1990-an, saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network, dimana semangat kerjasama, kekeluargaan dan gotong royong sangat hangat dan terasa di antara para pelakunya. Internet merupakan Pada saat sekarang ini tentu internet sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, yang awalnya internet hanya digunakan dikantor-kantor melalui komputer-komputer tetapi sekarang internet sangat bebas di akses oleh masyarakat umumnya,

Warnet sangat gemar dikunjungi oleh semua elemen masyarakat Kabupaten Tanah Datar, mulai dari anak-anak, remaja, dan bahkan orang dewasa, sehingga warung internet sangat banyak peminatnya, dan juga bertumbuh sangat pesat di kabupaten tanah datar.

Di dalam hal ini banyak juga para pelaku usaha internet yang melanggar peraturan tersebut, yang tujuan baik untuk mengambil keuntungan dengan sebesar-besarnya contohnya seperti membiarkan para pelajar tingkat SD, SMP, SMA bermain diwarung internet miliknya pada saat jam pelajaran sekolah, dan membiarkan para pelajar SD, SMP, SMA bermain di warung internet hingga larut malam, masih ada penyekatan lebih dari

40 cm antar komputer yang dilakukan oleh pengusaha warnet, tidak adanya jadwal layanan akses internet yang ditempelkan oleh pengusaha warung internet,.

Padahal di Peraturan Daerah Kab. Tanah datar no. 5 tahun 2015 ini tepatnya pada BAB IV pasal 13 dan 14 mewajibkan kepada pengusaha warnet untuk mematuhi segala yang berkaitan dengan warnet, dan begitu juga dengan pengguna atau pengunjung warnetnya, tetapi sebagian besar warnet masih banyak

Dari beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Peraturan Daerah Kab. Tanah Datar nomor 5 tahun 2015 Tentang Surat Izin Usaha maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi Peraturan daerah kab. Tanah Datar no. 5 tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa warung internet”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari fenomena-fenomena yang telah dibahas pada bagian latar belakang, maka penulis dapat merumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kab. Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Warung Internet?
2. Apa faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Kab. Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2015?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kab. Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Warung Internet.
 - b. Mengetahui apa saja faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Kab. Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Warung Internet.

2. Manfaat Penelitian
 - a. Sebagai Pengembangan ilmu administrasi negara khususnya pada konsentrasi kebijakan publik.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah kabupaten tanah datar dan lembaga-lembaga dalam pengambilan keputusan yang terkait pada Peraturan Daerah Kab. Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Warung Internet.
 - c. Sebagai panduan untuk peneliti berikutnya yang meneliti hal yang sama yaitu terkait dengan Peraturan Daerah Kab. Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Warung Internet.
 - d. Untuk mengembangkan teori yang telah di dapat selama kuliah di Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau.

1.4 Konsep Teori

1.4.1 Kebijakan Publik

Ilmu kebijakan merupakan terjemahan langsung dari kata *policy science*. istilah kebijaksanaan dan kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah karena pemerintah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum.

Defenisi kebijakan publik menurut **Winarno (2007:6)** dapat terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu :

1. Kebijakan yang berbentuk peraturan-peraturan yang ditulis dalam bentuk undang-undangan dan tidak tertulis namun disepakati.
2. Berkenaan dengan substansi dan berkenaan dengan prosedur.

1.4.2 Implementasi Kebijakan

Meter dan Horn dalam **Sujianto (2008:35)** mengatakan bahwa yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain :

- a. Standar dan Tujuan (*policy standar objecties*)

Standar dan tujuan kebijakan memberikan perhatian utama pada faktor faktor yang menentukan hasil kerja maka identifikasi indikator hasil kerja merupakan yang penting dalam analisis. Sumberdaya Kebijakan (*Policy Resources*)

Implementasi kebijakan bukan hanya pada standar dan tujuan, tetapi juga menyediakan sumberdaya yang dimaksudkan meliputi data dan insentif yang diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif.

- b. Aktifitas Pengamatan Dan Komunikasi Interorganisasional (*Interorgazational Comunication And Enforcement Activities*).

Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi.

Komunikasi antar organisasi merupakan hal yang kompleks. Karakteristik Pelaksana (*The Characteristics Of The Implementing Agencis*)

Struktur birokrasi dianggap karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan.

Lebih jelasnya karakteristik hubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi, sumberdaya pelaksana, validitas organisasi, tingkat komunikasi terbuka, yaitu jaringan komunikasi vertikal dan horizontal dalam organisasi hubungan formal dan informal

antara pelaksana dalam pembuat kebijakan.

c. Kondisi Ekonomi Sosial Dan Politik

Pada waktu implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik (eksospol). Pengaruh eksospol terhadap kebijakan pemerintah telah menjadi perhatian utama walaupun dampak dari faktor ini baru sedikit mendapat perhatian tapi faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan faktor eksospol yaitu :

- 1) Apakah sumberdaya-sumberdaya ekonomi yang tersedia dalam organisasi pelaksana cukup memadai untuk menunjang keberhasilan pelaksana.
- 2) Sejauhmana kondisi-kondisi sosial ekonomi yang akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
- 3) Bagaimana sifat umum : seberapa jelas masalah kebijakan yang terkait
- 4) Apakah kelompok elite menyetujui atau menentang pelaksanaan kebijakan.
- 5) Apakah karakteristik dari organisasi pelaksana : ada oposisi atau dukungan partisipan untuk kebijakan tersebut.

d. Disposisi atau sikap pelaksana

Variabel yang menyangkut masalah persepsi-persepsi pelaksana dalam juridis dimana kebijakan disampaikan. Ada tiga unsur yang mempengaruhi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan :

- 1) Kognisi (pemahaman dan pengetahuan).
- 2) Arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau menolak.
- 3) Intensitas dari respon pelaksana sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka ini yang akan

menyebabkan kesimpang siuran informasi tersebut.

1.5 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ini di adopsi dari Implementasi menurut Meter dan Horn dalam **Sujianto (2008:35)** dimana menurut Meter dan Horn mengatakan yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh enam variabel, variabel tersebut adalah : Standar dan Tujuan (*policy standar objecties*), Sumberdaya Kebijakan (*Policy Resources*), Aktifitas Pengamatan Dan Komunikasi Interorganisasional (*Interorgazational Comunication And Enforcement Activities*). Karakteristik Pelaksana (*The Characteristics Of The Implementing Agencis*), Kondisi Sosial ekonomi dan politik, Disposisi atau sikap pelaksana\

1.6 Konsep Operasional

Untuk mempermudah dalam mengenalkan teori dan menghindari salah pengertian dan pemahaman terhadap teori yang digunakan dalam penelitian ini maka penulis perlu memaparkan definisi konsep yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini.

kebijakan (*policy*) adalah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik.

Meter dan Horn dalam **Sujianto (2008:35)** mengatakan bahwa yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain :

- a) Standar dan Tujuan (*policy standar objecties*)

Standar dan tujuan kebijakan memberikan perhatian utama pada faktor faktor yang menentukan hasil kerja maka identifikasi indikator hasil kerja merupakan yang penting dalam analisis. Karena indikator ini menilai sejauh mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan, ini terbukti karena mudah diukur dalam berbagai kasus.

- b) Sumberdaya Kebijakan (*Policy Resources*)

Implementasi kebijakan bukan hanya pada standar dan tujuan, tetapi juga menyediakan sumberdaya yang dimaksudkan meliputi data dan insentif yang diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif.

c) **Aktifitas Pengamatan Dan Komunikasi Interorganisasional** (*Interorganizational Communication And Enforcement Activities*).

Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi.

Komunikasi antar organisasi merupakan hal yang kompleks. Penyampaian informasi kebawah pada suatu organisasi atau organisasi yang satu ke organisasi yang lain, mau atau tidak komunikator baik secara sengaja atau tidak. Implementasi yang akan berhasil memerlukan mekanisme dan prosedur intitusional dimana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan bertindak secara konsisten.

d) **Karakteristik Pelaksana** (*The Characteristics Of The Implementing Agencies*)

Struktur birokrasi dianggap karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan.

Lebih jelasnya karakteristik hubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi, sumberdaya pelaksana, validitas organisasi, tingkat komunikasi terbuka, yaitu jaringan komunikasi vertikal dan horizontal dalam organisasi hubungan formal dan informal antara pelaksana dalam pembuat kebijakan.

e) **Kondisi Ekonomi Sosial Dan Politik**

Pada waktu implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik (eksospol). Pengaruh eksospol terhadap kebijakan pemerintah telah menjadi perhatian utama walaupun dampak dari faktor ini baru sedikit mendapat perhatian tapi faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana.

f) **Disposisi atau sikap pelaksana**

Variabel yang menyangkut masalah persepsi-persepsi pelaksana dalam juridis dimana kebijakan disampaikan. Ada tiga unsur yang mempengaruhi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan : Kognisi (pemahaman dan pengetahuan), Arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau menolak, Intensitas dari respon pelaksana.

Enam variabel yang dikembangkan meter dan horn dalam menentukan keberhasilan implementasi, menunjukan adanya pengaruh dari sikap para pembuat kebijakan sendiri, tetapi juga ada unsur-unsur yang eksternal yang masih melihat kehendak kelompok sasaran. Dengan demikian, ada keseimbangan yang menunjukan keserasian antara program yang dibuat dengan kehendak kelompok sasaran. Ini dilakukan melalui komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksananya.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, **Sugiyono (2006:11)**. Penelitian ini bersifat penjelasan terhadap fenomena yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta.

1.7.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini akan dilaksanakan di dikantor Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Tanah Datar, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar, dan Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Tanah Datar.

1.7.2 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan informan sebagai objek

informasi mengenai Peran Komunikasi Antar Lembaga Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kab. Tanah Datar no. 5 Tahun 2015. Metode *snowball sampling* adalah metode penentuan sampel yang pertama-tama dipilih satu atau dua orang yang diberikan, Informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informasi Kab. Tanah Datar.
- b. Kepala Bidang dinas KOMINFO Kab. Tanah Datar
- c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanah Datar
- d. Kepala seksi penyidikan Polisi Pamong Praja Kab. Tanah Datar
- e. Seksi perizinan Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu Kab. Tanah Datar
- f. Pemilik Warnet
- g. Masyarakat

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 15 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Warung Internet

Masa kini teknologi telah banyak berkembang di masyarakat. Penggunaan teknologi oleh manusia sendiri diawali dengan alat-alat sederhana yang dibuat oleh manusia pada jaman dahulu. Dan pada saat sekarang ini tentu perkembangan teknologi lebih maju dari pada zaman dahulu

3.1.1 Standar dan Tujuan Kebijakan

tujuan dari Peraturan Daerah tersebut adalah :

- 1) Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan usaha jasa warung internet
- 2) Memberikan kepastian hukum kepada aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan/ atau pengawasan setiap kegiatan usaha jasa warung internet
- 3) Tersedianya usaha jasa warung internet yang berkualitas,

berdayaguna dan berdampak positif bagi masyarakat dengan memperhatikan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum.

Dalam menentukan standar dari sebuah kebijakan atau ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran, kita dapat menggunakan pernyataan dari para pelaksana kebijakan atau aparatur pemerintahan sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak fauzan selaku pelaksana kebijakan tentang warnet yang bagian dari Dinas Perhub. Komunikasi dan informasi Kab. Tanah Datar yaitu :

“Di dalam melaksanakan tugas untuk membina dan mengawasi jasa warung internet disini kami berpedoman kepada Peraturan Daerah Kab. Tanah Datar no. 5 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Warung internet, sebelumnya kami berlandaskan kepada Perbub, dan 14 seperti : warnet tidak diperbolehkan memasang sekat melebihi 40 cm dan memasang kaca gelap, warnet tidak diperbolehkan buka usaha jasa layanan internet sampai larut malam ataupun 24 jam, dan semua warnet harus memiliki izin usaha ” (wawancara dengan kabin Kominfo di Dinas Perhub. Kominfo Kab. Tanah Datar, 13 mei 2016).

3.1.2 Sumber Daya Kebijakan

Sumber Daya Kebijakan merupakan salah satu hal yang menunjang dalam kelancaran implementasi sebuah kebijakan. Sering kali kita mendengar bahwasanya para pelaksana kebijakan atau aparatur pemerintahan mengatakan bahwa kami dalam melaksanakan tugas sangat tergantung akan kekurangan sarana dan prasarana.

“Pada saat menjalankan tugas yaitu melakukan pembinaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang kami gunakan cukup memadai, alat-alat perkantoran kami cukup, hanya saja disini ada satu mobil kami mengalami kerusakan, dan itu menghambat kerja kami, tetapi kami cukup orang atau individu yang berkualitas untuk menjalankan tugas”(wawancara dengan

kabid kominfo di Dinas Perhub. Kominfo Kab. Tanah Datar, 13 mei 2016)

3.1.3 Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional

Dalam implementasi kebijakan tentu adanya pelaksana kebijakan yang mana para pelaksana kebijakan tersebut paham akan tugas yang akan di jalankannya,

Hal ini juga di perjelas oleh hasil wawancara dengan salah satu lembaga yang terkait dalam implemntasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 5 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Warung Internet yaitu:

“Kami dalam menjalankan tugas berdasarkan Perda, lembaga-lembaga yang terkait dalam melaksanakan perda ini ada tiga yaitu Dinas Perhub. Kominfo, KPPT, sama Satpol PP, yang mana tugasnya Satpol PP sebagai yang mengawasi dan menindak, KPPT sebagai perizinan Dan Dinas Perhub Kominfo sebagai Operasional atau melakukan pembinaan. Biasanya sebelum kami melakukan pengawasan kelapangan atau melakukan penindakan, biasanya kami dapat laporan dari Dinas Perhub Kominfo bahwasanya ada warnet yang melanggar peraturan, nah berangkat dari situlah baru kami”(wawancara dengan kasi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP, 18 mei 2016)

3.1.4 Karakteristik Pelaksana

Karakteristik Pelaksana merupakan sesuatu yang menjadi ciri-ciri dari pelaksana na kebijakan. Menurut van meter dan Horn Struktur birokrasi di anggap karakteristik, norma,.

Untuk mengetahui karakteristik pelaksana kebijakan, disini peneliti melakukan wawancara, sebagai berikut :

“Jumlah pegawai kami berjumlah 52 orang, yang terdiri dari 50 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, yang mana rata-rata dari pegawai kami sudah memasuki

usia lanjut, atau sudah uzur, dan kami sangat kekurangan pegawai atau anggota apabila ada pengawasan kelapangan”(wawancara dengan kasi penyidikan dan penindakan Satpol PP, 20 mei 2016)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa masih banyaknya warnet yang melanggar peraturan disebabkan oleh kurangnya jumlah pegawai dalam melaksanakan tugas, terutama apabila ada tugas melakukan pengawasan kelapangan, dan pegawai yang ada saat sekarang ini sudah memasuki usia lanjut, atau sudah uzur. Namun hal yang berbeda peneliti temui saat wawancara di Dinas Perhub Kominfo sebagai berikut :

“Pada saat menjalankankan tugas yaitu melakukan pembinaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang kami gunakan cukup memadai, alat-alat perkantoran kami cukup, hanya saja disini ada satu mobil kami mengalami kerusakan, dan itu menghambat kerja kami, tetapi kami cukup orang atau individu yag berkualitas untuk menjalankan tugas”(wawancara dengan kabid kominfo di Dinas Perhub. Kominfo Kab. Tanah Datar, 13 mei 2016)

3.1.5 Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Pengaruh eksospol terhadap kebijakan pemerintah telah menjadi perhatian utama walaupun dampak dari faktor ini baru sedikit mendapat perhatian tapi faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana.

Untuk mengetahui ada kondisi ekonomi, sosial dan politik yang didapat masyarakat dan pemerintah daerah tentang warnet ini, peneliti melakukan wawancara sebagai berikut :

“kondisi ekonomi yang di dapat masyarakat terutama yang memiliki warnet tentu ada perubahan, yang mana sampai saat sekarang ini warnet masih menjamur di wilayah Kab. Tanah datar, tentunya dengan membuka usaha warnet

ini para pemilik warnet memiliki keuntungan hingga mereka sampai bertahan selama ini, begitu juga dengan pemerintah, dalam pembuatan izin tentu ada biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha warnet, nah dari biaya tersebut pemerintah daerah mendapatkan dana atau masukkan”(wawancara dengan kasi penyidikan dan penindakan Satpol PP, 20 mei 2016).

3.1.6 Disposisi atau Sikap Pelaksana

Ada tiga unsur dalam sikap pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan pelaksana untuk melakukan sebuah kebijakan, yakni : pemahaman tentang kebijakan, tanggapan terhadap pelaksana kebijakan, dan intensitas tanggapan tersebut.

seperti yang peneliti temui saat wawancara dengan salah satu pemilik warnet, berikut ini :

“peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah tentang warnet ini banyak yang tidak kami setuju, seolah-olah pemerintah daerah membatasi ruang gerak kami, seperti dilarang membuka warnet 24 jam, dan itu justru akan mengurangi pendapatan kami, ya terkadang masyarakat sering bermain warnet pada malam hari, dan anak yang berseragam sekolah dilarang bermain warnet, terkadang anak yang memakai seragam sekolah bermain warnet itu rumahnya jauh, jadi mereka memutuskan bermain warnet dulu sebelum mereka pulang ke rumah mereka, sehingga mereka tidak bolak-balik”(wawancara dengan salah satu pemilik warnet di Kab. Tanah Datar, 20 mei 2016).

3.2 Faktor yang Menghambat Implementasi Peraturan Daerah Kab. Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Warung Internet.

3.2.1 Sumber Daya Kebijakan

Sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan tentu sangat perlu, dikarenakan sumber daya menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan, Pada sumber daya kebijakan terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya pendukung.

3.2.2 Aktifitas Pengamatan Komunikasi Interorganisasional

Komunikasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi suatu kebijakan, fungsi dari komunikasi salah satunya adalah untuk menyampaikan pesan atau informasi, di dalam implementasi suatu kebijakan disini yang bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi tentang Peraturan Daerah Kab. Tanah Datar No 5 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Warung Internet adalah Dinas Perhub Kominfo Kab. Tanah Datar, yang mana disini Dinas Perhub. Kominfo menyampaikan peraturan Daerah ini bertujuan agar semua masyarakat, pemilik warnet dan pelaksana kebijakan paham akan peraturan tersebut,

3.2.3 Disposisi atau Sikap Pelaksana

Pada Disposisi atau Sikap Pelaksana yang seperti kita ketahui bahwasanya ada tiga unsur yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan pelaksana untuk melakukan sebuah kebijakan, yakni : pemahaman tentang kebijakan, tanggapan terhadap pelaksana kebijakan, dan intensitas tanggapan tersebut. apabila pelaksana kebijakan dan penerima sebuah kebijakan sama-sama paham akan peraturan tersebut. Apabila pelaksana dan penerima sebuah kebijakan sudah paham akan peraturan maka implementasi sebuah kebijakan akan lancar dan maksimal.

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar No. 5 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Warung Internet belum berhasil dan maksimal, karena dalam pencapaian standar dan tujuan masyarakat atau pemilik warnet kurang menyetujui peraturan tersebut dan masyarakat

2. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar No. 5 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Warung Internet yaitu kurangnya jumlah anggota atau pegawai dan kurang berkualitasnya pegawai yang ada atau sumber daya manusianya tidak memadai, adanya sumber pendukung yang rusak, seperti mobil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : University Press.
- Hesel Nogi, S. Tangkilisan, 2003. *Kebijakan Publik Untuk pimpinan Berwawasan internasional*. Yogyakarta : Balairung.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public policy analisis strategi advokasi teori dan praktek*. Surabaya : PMN
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi Implementasi Dari Formulasi*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- . 2012. *Public policy (Dinamika, analisa Dan Manajemen kebijakan)*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Purwanto, Erwan A. dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : konsep dan aplikasinya di indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Sinabela, Lijan Poltak. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik* Jakarta : Bumi Aksara.

- Soetari, Endang. 2014. *Kebijakan Publik Bandung* : Pustaka Setia
- Subarsono. 2005. *Analisis kebijakan publik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial sebagai kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru : Alfabeta.
- Sulaeman, Affan. 1998. *Diklat Kebijakan Pemerintah*, Bandung : Buku Ilmu Pemerintahan Kerjasama Unpad-IIP

Sumber-sumber lain :

- Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada KPPT Kabupaten Tanah Datar.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi HO
- Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan (HO)

<http://tanahdatar.go.id/profil/2/visi-dan-misi.html> Diakses pada Tanggal 20 Januari 2015. Jam 20.14

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanah_Datar Diakses pada tanggal 15 Januari 2015. Jam 23.05